

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kontingensi

Teori kontingensi mula-mula diperkenalkan oleh Lawrence dan Lorsch (1967) kemudian dipakai oleh Katz dan Rosenzweig (1973) yang menyatakan bahwa tidak ada cara terbaik dalam mencapai kesesuaian antara faktor organisasi dan lingkungan untuk memperoleh prestasi yang baik bagi suatu organisasi. Menurut Sari (2006) dalam Azli dan Azizi (2009), teori kontingensi merupakan suatu teori yang cocok digunakan dalam hal yang mengkaji reka bentuk, perancangan, prestasi dan kelakuan organisasi serta kajian yang berkaitan dengan pengaturan strategik. Menurut Raybun dan Thomas (1991) dalam Azli dan Azizi (2009), teori kontingensi menyatakan pemilihan sistem akuntansi oleh pihak manajemen adalah tergantung pada perbedaan desakan lingkungan perusahaan. Pada tahap ini teori kontingensi bukanlah semata-mata sebuah teori namun lebih sebagai alat untuk memfasilitasi kita untuk memahami aliran situasi dari suatu kejadian dan memberi alternatif kepada organisasi atau individu untuk merespon aliran tersebut. Teori ini penting sebagai media untuk menerangkan perbedaan dalam struktur organisasi dan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan variabel-variabel situasional. Variabel yang sering dipakai dalam bidang ini adalah organisasi, lingkungan, teknologi, cara pembuatan keputusan, ukuran perusahaan, struktur, strategi, dan budaya organisasi (Raybun dan Thomas, 1991) dalam Azli dan Azizi (2009), serta ketidakpastian, teknologi, industri, misi dan strategi kompetitif, observabilitas. Berdasarkan teori di atas, pihak Usaha Mikro Kecil Menengah akan menyusun laporan keuangan atau menyajikan laporan keuangan berbasis SAK ETAP atas dasar desakan dari pihak eksternal untuk tujuan pengembangan usahanya dan dari pihak internal untuk tujuan evaluasi kegiatan usaha yang dilakukan.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.2.1 Definisi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh penggunaan eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemberi kredit.

Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut. Hal ini dimungkinkan apabila misalnya pihak otoritas berwenang merasa ketentuan pelaporan dengan menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanya ataupun terlalu rumit untuk entitas yang mereka awasi. Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK ETAP ini cukup ketat. Pada BAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 Januari 2011, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Selanjutnya ketentuan transisi juga menjelaskan bahwa entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal

ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK ETAP, namun kemudian mendaftarkan menjadi perusahaan publik di tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali. Sebaliknya entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan. SAK ETAP membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal. SAK ETAP akan khusus digunakan untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek dan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan tetap harus menggunakan PSAK yang umum.

2.2.2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Jenis laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK ETAP (2015), laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi hal-hal berikut :

a) Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas.

b) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, bagian laba

atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

c) Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam laporan ini menunjukkan :

1. Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, atau
2. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

d) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan ini berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Pengakuan dalam laporan keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK ETAP (2009).

1. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

- Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika :
Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas, dimiliki untuk diperdagangkan, diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
 - Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.
2. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika : Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas; Dimiliki untuk diperdagangkan : kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
 - Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.

SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “*matching concept*”.

2.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Menurut SAK ETAP penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antara periode harus konsisten kecuali :

- a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.
- b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Perihal informasi komperatif, dalam SAK ETAP nomor 3 paragraf 9 menyatakan bahwa informasi harus diungkap secara komperatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukan informasi komperatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan arus kas. Jika laporan keuangan termasuk komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Disamping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

1. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir.
2. Tanggal dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan.
3. Mata uang pelaporan.
4. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP

Tujuan laporan keuangan (SAK ETAP, 2009) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.2.5 Manfaat SAK ETAP

1. Entitas yang dimaksud dapat menyusun laporan keuangannya sendiri.
2. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit.
3. Dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana dari Bank untuk pengembangan usahanya.

2.2.6 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan SAK ETAP

Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP (SAK ETAP, 2009).

a) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

b) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan, menegaskan atau mengevaluasi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

c) Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang dapat diambil atas dasar laporan keuangan.

d) Keandalan

Agar bermanfaat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

- e) **Substansi Mengungguli bentuk**
Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.
- f) **Pertimbangan Sehat**
Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keandalan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keandalan tersebut melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan.
- g) **Kelengkapan**
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
- h) **Dapat Dibandingkan**
Pegguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
- i) **Tepat Waktu**
Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.
- j) **Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat**
Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian besar

pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan disusun dan disajikan selama setahun untuk memenuhi kebutuhan pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangat berbeda dan berhak untuk memperoleh informasi keuangan. Laporan keuangan dipergunakan oleh manajemen untuk dapat mengambil keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan sedangkan bagi investor laporan keuangan juga berguna dalam pengambilan keputusan, apakah ingin menanamkan saham atau tidak dalam perusahaan tersebut.

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dalam hal laporan keuangan sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Menurut Munawir (2014) laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2015) “laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Masing-masing laporan memiliki komponen keuangan tersendiri, tujuan, dan maksud sendiri. Lengkap tidaknya penyajian laporan keuangan tergantung dari kondisi perusahaan dan keinginan pihak Manajemen untuk menyajikannya. Disamping itu juga tergantung dari kebutuhan dan tujuan perusahaan dalam memenuhi kepentingan pihak-pihak lainnya (Kasmir, 2012).

Menurut Kasmir (2012) dapat dikatakan bahwa dari laporan keuangan akan tergambar kondisi keuangan suatu perusahaan yang dapat memudahkan Manajemen dalam menilai kinerja perusahaan. Penilaian kinerja akan menjadi

patokan atau ukuran apakah Manajemen mampu atau berhasil dalam menjalankan yang telah digariskan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berupa neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal yang merupakan catatan transaksi perusahaan dan perkembangan perusahaan selama periode tertentu.

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Seperti yang sudah diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam prakteknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Disamping itu tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan bagi pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak intern maupun ekstern yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan (Kasmir, 2013)

Kasmir (2013) menjelaskan beberapa tujuan penyusunan laporan keuangan, yaitu :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :

1. Aset
2. Liabilitas
3. Ekuitas
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian.
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
6. Arus kas, informasi tersebut beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Menurut (Harahap, 2013) mengemukakan bahwa, tujuan laporan keuangan merupakan dasar awal dari struktur teori akuntansi. Sedangkan menurut (Fahmi, 2013) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.

2.3.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari :

- a. Neraca

Neraca adalah laporan yang memberikan gambaran posisi atau letak suatu keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi kewajiban, ekuitas, dan aktiva pada saat tertentu.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang menyajikan menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan (*matching concept*), yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan, antara pendapatan dan beban yang terkait. Laporan laba rugi juga menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi (Warren, dkk, 2015).

c. Laporan Perubahan Modal

Merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal yang dimiliki pada saat ini. Selanjutnya laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal diperusahaan. Laporan perubahan modal jarang dibuat bila tidak terjadi perubahan modal, yang artinya laporan ini baru dibuat bila memang ada perubahan modal.

d. Laporan Arus Kas

Merupakan laporan yang menyajikan pengeluaran dan penerimaan kas selama periode tertentu. Laporan Arus Kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Laporan Arus Kas terdiri dari atas tiga bagian, yaitu :

1. Aktivitas operasi, bagian dari melaporkan ringkasan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi biasanya akan berbeda dari jumlah laba bersih dalam satu periode.
2. Aktivitas pendanaan, bagian ini melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi oleh pemilik, peminjaman, dan penarikan kas oleh pemilik.
3. Aktivitas investasi, bagian ini melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset yang sifatnya permanen, yang mencakup seperti gedung, tanah dan perabotan kantor.

Menurut Kasmir (2013) laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Masing-masing laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam melihat kondisi keuangan perusahaan baik secara sebagian maupun secara keseluruhan. Namun dalam praktiknya perusahaan dituntut untuk menyusun beberapa jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan terutama untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pihak lain.

2.3.4 Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Artinya penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi beberapa kepentingan berbagai pihak, diantaranya pihak *intern* dan *ekstern*. Pihak intern adalah pihak yang paling berkepentingan yaitu pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara pihak ekstern merupakan pihak luar yaitu mereka yang memiliki hubungan kerja sama. Berikut penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan :

1. Pemilik

Pemilik adalah mereka yang pada saat ini memiliki usaha tersebut, hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan laporan keuangan bagi pemilik saham adalah :

- Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam satu periode. Kemajuan bias dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan.
- Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan, untuk menentukan langkah apa saja yang perlu dilakukan.

2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan

yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen.

- Dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam satu periode, apakah telah mencapai target yang telah ditentukan.
- Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

3. Kreditur

Kreditur adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti Bank atau Lembaga Keuangan perusahaan. Kepentingan pihak kreditur terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memeberikan pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan. Kepentingan pihak kreditur antara lain:

- Pihak kreditur tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kebangkrutan atau kegagalan dalam pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet).
- Pihak kreditur juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki poin penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui departemen keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara.

5. Investor

Merupakan pihak yang hendak menanamkan dana disuatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya disamping memperoleh dari lembaga keuangan seperti Bank dapat

juga diperoleh dari investor melalui penjualan saham. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (deviden) serta perkembangan nilai saham kedepan. Selanjutnya barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak (Kasmir, 2013).

2.3.5 Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013), keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan disusun berdasarkan historis dimana data yang diambil dari masalalu.
2. Laporan keuangan dibuat umum, yaitu untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
3. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian.
4. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.

Dalam prinsip-prinsip akuntansi indonesia atau Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara terperinci menjelaskan tentang sifat dan keterbatasan laporan keuangan yaitu :

1. Laporan keuangan bersifat historis, laporan kejadian yang telah lewat karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan.

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, bila terhadap beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.
6. Laporan keuangan lebih menekankan kepada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya.
7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknik, dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknik akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antara perusahaan.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM sering kali dihubungkan dengan modal yang terbatas, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sebuah usaha. Umumnya, jenis usaha ini erat berkaitan dengan kategori masyarakat kelas menengah ke bawah. Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya firma dan CV, maupun perseroan terbatas. Di Indonesia sendiri UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun ketentuan umum yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu sebagai berikut :

1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
2. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas

yang menyatakan sah bahwa UMKM telah memenuhi syarat dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

3. Jangka waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada UMKM.
4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
5. Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam pemberdayaan pemerintah dilakukan dengan cara :
 - Pengembangan Usaha
 - Kemitraan
 - Perizinan
 - Koordinasi dan Pengendalian

Adapun pengembangan usaha yang telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha dilakukan terhadap UMKM meliputi :
 - Fasilitasi pengembangan usaha
 - Pelaksanaan pengembangan usaha
 - Kegiatan pengembangan
 - Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pelaksanaan ini dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Adapun pengembangan UMKM ini dilakukan melalui :

1. Pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi.
2. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi.
3. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan.
4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pengembangan UMKM ini dilaksanakan melalui pendekatan berupa :

1. Koperasi
2. Sentra
3. Klaster
4. Kelompok

Adapun unsur-unsur dalam kemitraan pada UMKM yaitu :

1. Pola Kemitraan
 - Inti Plasma
 - Subkontrak
 - Waralaba
 - Perdagangan umum
 - Distribusi dan keagenan
 - Bagi hasil
 - Kerjasama operasional
 - Usaha patungan
 - Penyumberluaran dan
 - Bentuk kemitraan lainnya.

Tabel 2.1
Karakteristik UMKM

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti • Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat • Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun • Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha • Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai • Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah • Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank • Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP

Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah • Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah • Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana • Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga • Sudah membuat neraca usaha • Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP • Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha. • Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi • Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan • Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan • Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga • Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan • Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik

Sumber : Profil Bisnis UMKM (Bank Indonesia, 2015).

2.4.1 Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Fenomena masalah yang sering terjadi dan banyak dihadapi oleh para pengelola UMKM salah satunya adalah masalah permodalan untuk mengembangkan usaha yang sangat kompetitif sehingga produk juga harus diperkuat. Pentingnya penerapan ilmu akuntansi dalam pengelolaan keuangan UMKM dinilai masih kurang dipahami oleh para pengusaha. Masih banyak pengusaha kecil yang belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dengan baik, bahkan ada juga yang tidak melakukan pencatatan laporan keuangan pada usahanya sendiri. Para pengusaha kecil dan menengah biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja. Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit diperoleh, sehingga pengajuan kredit ke bank untuk modal usaha sulit diperoleh, dikarenakan sebagian besar dari pelaku UMKM memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013).

Basri dan Nugroho (2009) menyebutkan bahwa pada dasarnya kondisi UMKM saat ini sedang menghadapi tiga kategori permasalahan yang sering kali mendera UMKM, yaitu :

1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar (*Basic Problems*) yaitu permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, sumber daya manusia, pengembangan produk dan akses pemasaran.
2. Permasalahan lanjutan (*Advance Problems*) yang berupa pengenalan dan penetrasi pasar ekspor belum optimal, keterbatasan pengetahuan terkait prosedur kontrak penjualan serta peraturan di negara ekspor tujuan.
3. Permasalahan antara (*Intermediate Problems*) yakni permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan lain tersebut antara lain manajemen keuangan, pengajuan kredit, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.

2.4.2 Prinsip Dasar Akuntansi pada UMKM

Prinsip dasar dalam akuntansi merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya sebagai dasar dari ilmu akuntansi itu dibangun, (Harahap, 2007). Berikut disebutkan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) :

1. Economic entity

Prinsip ini menyatakan bahwa UMKM dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya. Sebagai implikasinya, hubungan antara UMKM dan pemilik diperlakukan sebagai transaksi antara dua pihak yang terpisah.

2. Monetary unit

Informasi akuntansi disajikan dalam bentuk satuan uang.

3. Going concern

Prinsip ini merupakan asumsi yang digunakan oleh akuntansi, yaitu bahwa UMKM akan melanjutkan usahanya di masa depan tanpa batas waktu.

4. Periodicity

Prinsip ini menetapkan masa hidup UMKM terdiri dari periode-periode. Salah satu konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa UMKM melakukan penyusunan laporan keuangan.

5. Historical cost

Prinsip ini menjadikan akuntansi mengukur transaksi sebesar harga perolehan (kos) pada saat transaksi terjadi.

6. Substance over form

Prinsip ini menyatakan bahwa akuntansi lebih mengutamakan substansi (makna ekonomis yang sesungguhnya) sebuah transaksi dibanding aspek formal (legal). Berdasar ketentuan ini maka transaksi sewa – guna (*leasing*) yang memenuhi kriteria tertentu dicatat sebagai aset tetap meskipun secara legal UMKM tidak mempunyai hak kepemilikan atas aset tetap tersebut.

7. Accrual basis

Prinsip ini terkait dengan elemen pendapatan dan biaya, pengakuan pendapatan dan biaya dicatat berdasar waktu terjadinya pendapatan dan biaya tersebut, bukan berdasar saat penerimaan atau pengeluaran kas. Meskipun kas belum diterima tetapi jika pendapatan telah memenuhi kriteria untuk diakui maka akan dicatat pada periode terjadinya pendapatan. Dasar akrual ini juga berlaku untuk

pengakuan biaya. Meskipun kas belum dibayarkan tetapi jika biaya telah memenuhi kriteria untuk diakui maka akan dicatat pada periode terjadinya biaya.

8. Matching cost with revenue

Prinsip ini menggunakan analogi bahwa kinerja sebuah entitas seharusnya dilakukan dengan menandingkan antara usaha (*effort*) yang dilakukan dengan pencapaian (*achievement*) yang dihasilkan.

9. Conservatism

Prinsip ini menjadikan akuntansi mengakui segera biaya/rugi potensial yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, dan mengakui pendapatan/laba potensial hanya jika pendapatan/laba tersebut memenuhi syarat untuk diakui.

10. Cost & benefit analysis

Berlandas prinsip ini maka pencatatan akuntansi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh lebih besar dibanding biaya yang harus ditanggung untuk menghasilkan informasi tersebut.

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Laporan Keuangan UMKM

2.5.1 Lama Usaha (X1)

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan/keahliannya), sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. Keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil di jaring .

Lama usaha dalam hal ini adalah lamanya suatu usaha Mikro, Kecil atau Menengah (UMKM) didirikan atau umur dari usaha tersebut semenjak usaha tersebut berdiri sampai pada saat penulis melakukan penelitian ini. Dengan asumsi bahwa semakin lama usaha tersebut berjalan maka akan mengakibatkan adanya perkembangan usaha yang signifikan kearah yang positif atau negatif. Perkembangan dari usaha tersebut tergantung dari iklim perdagangan dan persaingan yang terjadi didunia usaha atau pasar. Dan biasanya usaha yang lebih

lama berdiri cenderung lebih berkembang karena sudah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan usahanya. Dan juga usaha yang memiliki umur yang bisa dibilang mapan lebih dapat bersaing dengan usaha/pelaku UMKM lainnya.

Menurut Kusnia (2013) dalam Tuti dan Dwijayanti (2014) lama usaha adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk hidup yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut eksis dan mampu bersaing dalam pasar sehingga dapat mempertahankan usahanya serta mencapai tujuan yang diinginkan.

2.5.2 Latar Belakang Pendidikan (X2)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Pasal 3 UU RI No.20 Tahun 2003).

Latar belakang pendidikan disini adalah latar belakang pendidikan formal. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menjelaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkahlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No.20 Tahun 2003).

Menurut penelitian yang Firmansyah (2014) bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.

2.5.3 Jenjang Pendidikan (X3)

Jenjang pendidikan yang formal dalam undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab IV Pasal 14 yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan tersebut mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, vokasi, keagamaan, dan kursus.

Jenjang pendidikan pemilik sebagai variabel independen (variabel bebas) yang merupakan variabel berpengaruh terhadap variabel dependen (variabel terikat). Jenjang pendidikan diukur berdasarkan pendidikan formal yang pernah diikuti sehingga pengukurannya bersifat kontinyu. Pendidikan formal yang dimaksudkan adalah pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah formal antara lain Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat, Diploma (DIII), Sarjana (SI) dan Pascasarjana (S2).

Menurut Wahyono (2012) dalam Tuti dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa jenjang pendidikan merupakan tingkatan atau tahapan pendidikan yang harus ditempuh berdasarkan peserta didik, tujuan yang dicapai dan kemampuan yang ingin dikembangkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rudiantoro dan Siregar (2012) dalam Rohmah (2016) menunjukkan bahwa jenjang pendidikan berpengaruh positif terhadap laporan keuangan

2.5.4 Ukuran Usaha (X4)

Perusahaan didirikan dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh merupakan alat bagi perusahaan untuk melakukan aktivitas usaha selanjutnya. Perusahaan yang tidak memiliki kemampuan dalam membukukan pendapatan maka akan mengalami financial distress dan akhirnya mengalami kebangkrutan.

Ukuran perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat total aset, berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan, dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi Holmes dan Nicholls (1998) dalam Grace (2003).

Rudiantoro dan Siregar (2012) menemukan bahwa ukuran usaha berpengaruh terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya. Keberhasilan UMKM dalam membukukan pendapatan/laporan keuangannya, yang dilihat dari periode sebelumnya, merupakan indikasi bahwa usaha UMKM tersebut *calculated risk* dan *high return investment*.

2.5.5 Pemberian Informasi dan Sosialisasi (X5)

Pemberian informasi dan sosialisasi ini dimaksudkan bahwa setiap tenaga kerja yang ada pada UMKM membutuhkan informasi dan sosialisasi mengenai pengetahuan yang lebih dari apa yang mereka kerjakan dalam masing-masing bidang usaha tersebut. Pemberian informasi dan sosialisasi ini juga sangat diperlukan oleh pemilik usaha agar lebih memahami hal yang dapat mengembangkan usahanya tersebut. Menurut Abdul Kadir (2002) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.

Menurut Tuti dan Dwijayanti (2014) pemberian informasi dan sosialisasi sendiri merupakan sebuah metode/cara untuk mengenalkan dan membantu UMKM dalam mengetahui dan memahami tentang SAK ETAP.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

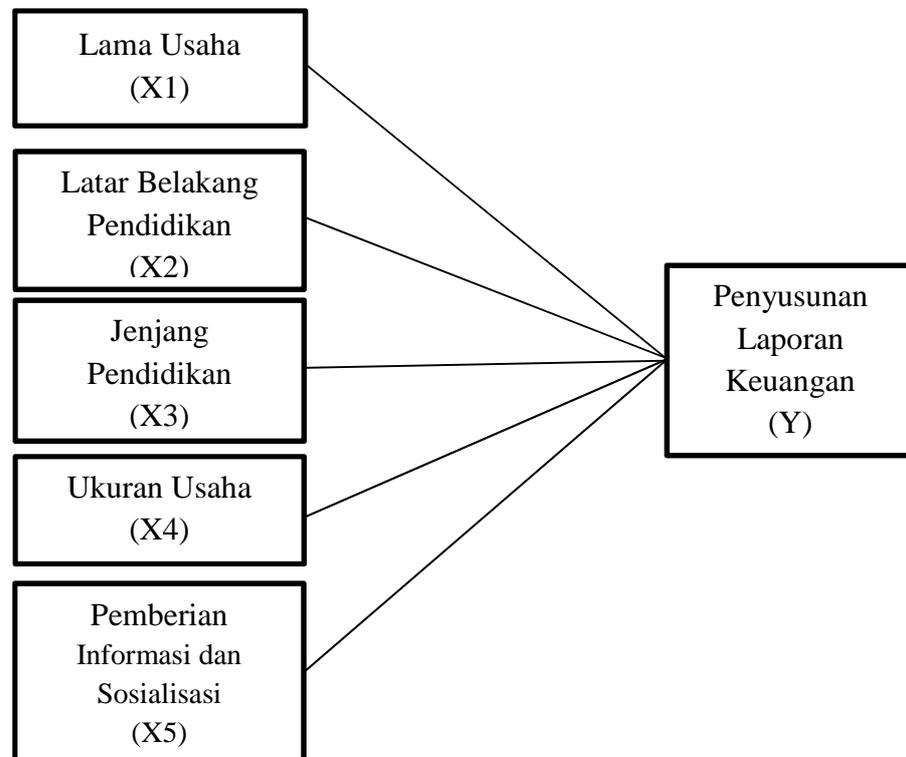
Nama, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Rudiantoro dan Siregar (2012)		Kuantitatif Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran usaha berpengaruh positif terhadap persepsi laporan keuangan. 2. Lama usaha berpengaruh negatif terhadap persepsi UMKM. 3. Jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan tidak terbukti signifikan terhadap persepsi.
Sixpria,dkk (2013)		Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMKM di Indonesia memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. 2. Praktek akuntansi UMKM di Indonesia masih rendah. 3. Tidak terselenggaranya akuntansi bukan hanya kesalahan pengusaha UMKM tetapi juga belum

			<p>optimalnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pengembangan UMKM.</p> <p>4. Penyebab sulitnya pengembangan UMKM karena tidak tersedianya informasi akuntansi secara lengkap.</p> <p>5. Penerapan akuntansi untuk wilayah Depok masih memiliki masalah yang sama dengan UMKM lainnya.</p>
Tuti dan Dwijayanti (2014)	<p>Independen : Pemberian Informasi dan sosialisasi (X1), Latar Belakang Pendidikan (X2), Jenjang Pendidikan (X3), Lama Usaha (X4), Ukuran Usaha (X5) Dependen: Pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP(Y)</p>	Kuantitatif Deskriptif	<p>1. Lama usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM terhadap laporan keuangan.</p> <p>2. latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM terhadap laporan keuangan.</p> <p>3. Pemberian Informasi dan sosialisasi serta ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM terhadap laporan keuangan.</p>
Firmansyah (2014)	<p>Independen : latar belakang pendidikan, jenis usaha, pengalaman usaha, skala usaha, pelatihan akuntansi Dependen : penggunaan sistem informasi akuntansi</p>	Kuantitatif	<p>1. Variabel latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi</p> <p>2. Variabel jenis usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi</p> <p>3. Variabel pengalaman usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi</p> <p>4. Variabel skala usaha berpengaruh</p>

			<p>positif terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi</p> <p>5. Variabel pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi</p>
Putri, dkk (2015)		Kualitatif	<p>Terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terutama dalam menghadapi era ACFTA 2015. Pertama, permasalahan yang terkait dengan penyusunan keuangan. Kedua, permasalahan yang terkait dengan permodalan. Ketiga, masalah yang terkait dengan penguasaan teknologi dan keempat adalah permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk maupun jasa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).</p>
Rohmah (2016)	<p>Independen:Lama Usaha,Latar Belakang Pendidikan,Jenjang Pendidikan,Jenis Usaha,Pemberian Informasi dan Sosialisasi</p> <p>Dependen:Penyusunan Laporan Keuangan</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial jenjang pendidikan serta pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Sedangkan lama usaha berpengaruh negatif terhadap penyusunan laporan keuangan.</p>

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Lama usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan

Lama usaha dalam hal ini adalah lamanya suatu usaha Mikro, Kecil atau Menengah (UMKM) didirikan, lama usaha dikatakan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan karena semakin lama usaha berdiri semakin berkembang juga pengetahuan yang tertanam pada sumber daya manusia yang ada pada UMKM.

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seorang pelaku usaha atau bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan/keahliannya), sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. Keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil di jaring .

Menurut Kusnia (2013) dalam Tuti dan Dwijayanti (2014) lama usaha adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk hidup yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut eksis dan mampu bersaing dalam pasar sehingga dapat mempertahankan usahanya serta mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Tuti dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM terhadap laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

H1 : Lama usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM.

2.8.2 Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM

Latar belakang pendidikan dimaksudkan sebagai latar belakang pendidikan formal. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menjelaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No.20 Tahun 2003). Latar belakang pendidikan pemilik UMKM ataupun karyawan UMKM menentukan sejauh mana pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan pada usaha yang dikelolanya. Dengan demikian latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap perilaku sumber daya manusia yang berada pada UMKM. Penelitian yang telah dilakukan oleh Tuti dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM terhadap laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

H2 : Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM.

2.8.3 Jenjang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM

Jenjang pendidikan yang dicapai oleh pemilik atau pegawai suatu UMKM sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha, karena semakin tinggi pencapaian jenjang pendidikan semakin baik pula pengetahuan yang dapat menjadikan suatu usaha itu berkembang. Menurut Wahyono (2012) dalam Tuti dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa jenjang pendidikan merupakan tingkatan atau tahapan pendidikan yang harus ditempuh berdasarkan peserta didik, tujuan yang dicapai dan kemampuan yang ingin dikembangkan. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012) yang menunjukkan bahwa jenjang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

H3: Jenjang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM.

2.8.4 Ukuran usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM

Ukuran perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat total aset, berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan, dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi Holmes dan Nicholls (1998) dalam Grace (2003).

Ukuran usaha merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan lingkungan pengusaha UMKM. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya. Ukuran usaha yang besar berimplikasi perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga lebih mampu mempekerjakan karyawan dengan keahlian yang lebih baik (Gray, 2006). Menurut penelitian Rudiantoro dan Siregar (2011) menyatakan bahwa ukuran usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H4: Ukuran usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM.

2.8.5 Pemberian Informasi dan Sosialisasi berpengaruh terhadap laporan keuangan

Pemberian informasi dan sosialisasi ini dimaksudkan bahwa setiap tenaga kerja yang ada pada UMKM membutuhkan informasi dan sosialisasi mengenai pengetahuan yang lebih dari apa yang mereka kerjakan dalam masing-masing bidang usaha tersebut. Pemberian informasi dan sosialisasi ini juga sangat diperlukan oleh pemilik usaha agar lebih memahami hal yang dapat mengembangkan usahanya tersebut. Dalam hal ini pengelola UMKM membutuhkan pemberian informasi dan sosialisasi agar sumber daya manusia yang ada dalam usahanya dapat mengetahui dan memahami pentingnya informasi tentang terhadap pengembangan usaha, informasi dalam hal ini berupa informasi terhadap pemahaman penyusunan laporan keuangan. Menurut Abdul Kadir (2002) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Rudiantoro dan Siregar (2014), bahwa informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

H5: Pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM.